



KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 050 / 23 / KEP/DPPPAKB/V/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 63);
17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 182);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Mei 2026

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG,



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Keluarga dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dan Penegakan Intergritas		Indikator Tujuan 1 Indeks ketimpangan gender	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS	Indeks/ Point	0,229	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	
		Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan	Indikator Sasaran 1 Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS	Indeks	65,50	65,60	65,72	65,84	65,96	66,08	
			Indikator Sasaran 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS	Persen	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	
			Indikator Sasaran 3 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah perempuan korban kekerasan/Jumlah penduduk perempuan x 100%	Persen	0,047	0,046	0,045	0,043	0,041	0,039	
			Indikator Tujuan 2 Indeks perlindungan anak	Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Indeks	67,70	67,75	67,80	67,85	67,90	67,95	
		Sasaran 2 Terpenuhinya upaya perlindungan dan penjaminan hak anak	Indikator Sasaran 1 Predikat Kota Layak Anak	Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Predikat	501 (Pratama)	550 (Pratama)	600 (Pratama)	610 (Madya)	620 (Madya)	640 (Madya)	

			Indikator Tujuan 3 Indeks pembangunan keluarga	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Indeks/ Point	73,5	74	74,5	75	75,5	76	
	Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk	Indikator Sasaran 1 Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49 tahun)	(15-49 tahun)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Rata - Rata Anak Per Wanita	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
		Indikator Sasaran 2 Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting		Jumlah keluarga berisiko stunting tahun lalu - Jumlah keluarga berisiko stunting tahun ini/Jumlah keluarga berisiko stunting tahun lalu x 100%	Persen	0,13	2	2	2	2	2	
		Indikator Sasaran 3 Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera		Jumlah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera/Jumlah total kelurahan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Indikator Tujuan 4 Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah		Hasil penilaian BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	
	Sasaran 4 Terlaksananya Implementasi Kebijakan SPIP secara Terintegrasi, Komprehensif dan Sistematis	Indikator Sasaran 1 Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah		Hasil penilaian Inspektorat Kota Pangkal Pinang	%	100	100	100	100	100	100	

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG



Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

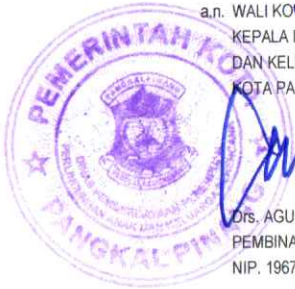
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR RENSTRA 2030
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Anak, Kualitas Keluarga dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat serta Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan dan Penegakan Integritas				Indikator Tujuan 1 Indeks ketimpangan gender	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh BPS	Indeks/ Point	0,229	0,209	0,208	0,207	0,206	0,205	0,205
		Sasaran 1 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam partisipasi pembangunan			Indikator Sasaran 1 Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Hasil Perhitungan yang Dikeluarkan oleh BPS	Indeks	65,50	65,60	65,72	65,84	65,96	66,08	66,08
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan /atau penyusunan Kebijakan	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Data Terpilah Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan /atau penyusunan Kebijakan / Total Keseluruhan Perangkat Daerah x 100%	%			5	7	9	11	11
					Indikator Sasaran 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Hasil Perhitungan yang Dikeluarkan oleh BPS	Persen	53,71	55,39	55,95	56,5	57,06	57,62	57,62
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah ARG pada Belanja Operasi dan Modal APBD / Jumlah Seluruh Anggaran pada Belanja Operasi dan Modal APBD x 100%	%	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0
					Indikator Sasaran 3 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan/Jumlah Penduduk Perempuan x 100%	Persen	0,047	0,046	0,045	0,043	0,041	0,039	0,039
			Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

					Indikator Tujuan 2 Indeks perlindungan anak	Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks	67,70	67,75	67,80	67,85	67,90	67,95	67,95
		Sasaran 2 Terpenuhinya upaya perlindungan dan penjaminan hak anak			Indikator Sasaran 1 Predikat Kota Layak Anak	Hasil Penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Predikat	501 (Pratama)	550 (Pratama)	600 (Pratama)	610 (Madya)	620 (Madya)	640 (Madya)	640 (Madya)
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terpenuhinya Standar Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	Persentase Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak Sesuai Standar / Jumlah Fasilitas Pemerintah dan Fasilitas Kesehatan x 100%	%			36	37	38	39	39
			Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
					Indikator Tujuan 3 Indeks pembangunan keluarga	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Indeks/ Point	73,5	74	74,5	75	75,5	76	76
		Sasaran 3 Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pengendalian jumlah penduduk			Indikator Sasaran 1 Angka kelahiran total (TFR) Per WUS (15-49 tahun)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Rata - Rata Anak Per Wanita	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,13
			Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun /Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19 tahun)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	27,4	24,14	21,7	20	18,7	18,7	18,7
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	%	16,4	16,3	16,2	16,1	16	15,9	15,9
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Hasil Perhitungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	%	60,5	61	62	63	64	65	65

				Indikator Sasaran 2 Persentase Penurunan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah keluarga berisiko stunting tahun lalu (n-1)-Jumlah keluarga berisiko stunting tahun ini (tahun n)/Jumlah keluarga berisiko stunting tahun lalu x 100%	Persen	0,13	2	2	2	2	2	2
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga / Total Seluruh Keluarga x 100%	%	21,56	22	22,5	23	23,5	24	24
				Indikator Sasaran 3 Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Upaya Peningkatan Keluarga Sejahtera/Jumlah total kelurahan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kelurahan	Persentase Fasilitas Tata Kelola Kelurahan	Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang/Total Jumlah Kelurahan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif/ Jumlah Total Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan x 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
				Indikator Tujuan 4 Hasil Penjaminan Kualitas Manajemen Risiko Indeks (MRI) Perangkat Daerah	Hasil penilaian BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	3
	Sasaran 4 Terlaksananya Implementasi Kebijakan SPIP secara Terintegrasi, Komprehensif dan Sistematis			Indikator Sasaran 1 Persentase Penyelesaian Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Kota Pangkal Pinang	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan / Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang terealisasi dalam APBD tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah yang direncanakan dalam renja tahun berkenaan / Jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan perangkat daerah yang terealisasi dalam APBD tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100

					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang direncanakan dalam Renja tahun berkenaan / Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terealisasi dalam APBD tahun berkenaan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	100
--	--	--	--	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKAL PINANG

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004